



LAPORAN TAHUNAN 2017

PETA CAKUPAN WILAYAH PENELITIAN SMERU 2017



- 1 Penelitian Sosial Kualitatif Indonesia Road Survey Service (IRSS)-EINRIP M&E - 2016
- 2 Pemantauan Lapangan dan Pemantauan Proses PKKPM-P2B 2015-2016
- 3* Penguatan Pelayanan Kesehatan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2016
- 4 Meningkatkan Hasil Ketenagakerjaan: Transformasi Struktural dan Pelepasan Tenaga Kerja dari Sektor Pertanian
- 5 Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong Kube-PKH
- 6 Kajian terhadap Faktor Kunci dalam Mewujudkan Lingkungan Kondusif bagi Kegiatan/ Program Penghidupan Berkelanjutan/P2B
- 7** Kajian Kebijakan untuk Mengurangi Ketimpangan
- 8 Pembaruan dan Penyempurnaan Peta Kemiskinan & Penghidupan Indonesia
- 9 Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan (dengan Penekanan Khusus pada Pertanian Tembakau)
- 10 Studi Tata Kelola Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Pemantauan Pelaksanaan UU Desa)
- 11 Evaluasi Program *Families First* terkait Disiplin Positif untuk Pengasuhan Sehari-hari dengan Program Kunjungan Rumah, Sebuah Intervensi Uji Coba di Indonesia: Survei Lanjutan
- 12 Gender dan Reformasi Subsidi Bahan Bakar Fosil: Audit Data - Indonesia
- 13 Program RISE di Indonesia
- 14 Penelitian Sosial Kualitatif Indonesia Road Survey Service (IRSS)-EINRIP M&E - 2017
- 15 Studi Dinamika Ketimpangan di Perdesaan Indonesia
- 16 Pemberdayaan dan Partisipasi-Menghubungkan Realitas Lokal dengan Aksi Global-Pekerjaan Tidak Berbayar
- 17 Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Publik: Studi *Midline*
- 18 Kemampuan Kognitif, Kewirausahaan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- 19 Kajian Kebijakan untuk Mendukung Strategi Pembangunan Nasional: Penyusunan *Platform* Koordinasi Kebijakan Pertanian dan Pangan
- 20 Penyusunan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB): Tujuan 10 - Berkurangnya Kesenjangan





Dr. Asep Suryahadi (Direktur SMERU) bersama dengan Dr. TGH. M. Zainul Majdi (Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat) membuka acara "Lokakarya Pencapaian MDGs di NTB dan Tantangan Menuju SDGs" Mataram, Lombok, 7 Maret 2017.

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

The SMERU Research Institute.

Laporan Tahunan 2017

/ ditulis oleh The SMERU Research Institute.

40 p. ; 27 cm.

Termasuk indeks.

ISBN 978-602-7901-46-9

ISSN 977-259-7881-00-3

1. Penelitian I. Judul

2. Laporan Tahunan

0014--ddc22

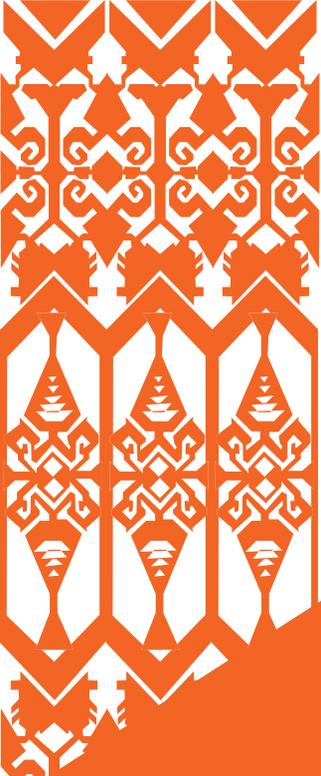


@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute





TENTANG KAMI

The SMERU Research Institute adalah sebuah lembaga independen yang melakukan studi kebijakan publik dan merupakan lembaga terdepan dalam penelitian di bidang kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Kerja penelitian kami berfokus pada berbagai aspek sosial-ekonomi yang sangat penting bagi isu-isu pembangunan kontemporer di Indonesia. Kami mengkhususkan diri pada analisis kemiskinan, penelitian kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi. Ketiga elemen penghasil pengetahuan yang saling berhubungan ini diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti yang tepat bagi orang-orang paling miskin dan rentan di Indonesia.

VISI

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari kemiskinan absolut dan ketidakmerataan yang tinggi melalui penelitian yang bertujuan menghasilkan strategi, kebijakan, dan aksi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan yang berbasis bukti.

MISI

- Melakukan penelitian mengenai berbagai isu terkait kemiskinan guna memperbaiki kebijakan publik dan swasta, serta pelaksanaannya.
- Melakukan penjangkauan efektif kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, masyarakat sipil, kalangan akademis, komunitas internasional, dan sektor swasta.
- Mendukung wacana kebijakan publik dan swasta yang inklusif mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan.
- Memperkuat peran masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dan swasta.



SAMBUTAN PEMBINA

Pada 2017 The SMERU Research Institute meraih keberhasilan besar dengan memenangkan tender Research on Improving Systems of Education (RISE) untuk penelitian di Indonesia selama lima tahun. RISE yang merupakan riset global di enam negara—Etiopia, India, Indonesia, Pakistan, Tanzania, dan Vietnam—adalah program penelitian terbesar yang pernah SMERU lakukan. SMERU sendiri memfokuskan penelitiannya pada beberapa isu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dasar, terutama reformasi guru. Hal ini disebabkan riset pendidikan berperan penting dalam mewujudkan visi SMERU menuju Indonesia yang bebas dari belenggu kemiskinan absolut dan ketimpangan tinggi.

Proyek RISE memberi ruang bagi SMERU untuk berkontribusi pada sebuah proses panjang yang berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia. Ketika murid yang bersekolah saat ini memasuki dunia kerja kelak, diperkirakan 65% ragam pekerjaan yang dikenal sekarang akan menghilang dan jenis pekerjaan baru yang kini bentuknya belum terbayangkan akan bermunculan. Dengan kualitas pendidikan Indonesia yang menurut ukuran beberapa standar internasional tergolong rendah, masa depan daya saing sumber daya manusia Indonesia berada dalam keadaan darurat. Pertanyaannya adalah siapa yang akan memperbaikinya dan bagaimana caranya?

Tantangan yang kita hadapi sangatlah berat. Di satu sisi, rendahnya hasil penilaian standar internasional belum mampu memacu gairah birokrat pendidikan di Indonesia untuk melakukan inovasi pendidikan. Di sisi lain, menurut hasil studi Blane Lewis pada 2010, mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas atas praktik layanan pendidikan yang diberikan. Alasannya, mungkin ekspektasi warga atas taraf layanan pendidikan memang tergolong rendah atau mungkin juga disebabkan bias *ewuh pakewuh* ketika

mereka menjawab pertanyaan tentang derajat kualitas layanan pendidikan yang mereka terima. Dengan kata lain, warga masyarakat kurang kritis dalam menilai realitas rendahnya kualitas pendidikan.

Oleh karena itu, proses dan hasil penelitian RISE harus bisa menjangkau baik birokrat pembuat kebijakan maupun publik penerima layanan pendidikan. SMERU memiliki pengalaman panjang dalam mengomunikasikan hasil penelitian kepada birokrat pemerintah (eksekutif), tetapi kampanye kepada masyarakat masih terbatas. Untuk menutupi keterbatasan itu, berpaling ke Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D) merupakan strategi yang patut dipertimbangkan. Proses dan hasil penelitian RISE hendaklah dapat menggemakan perbincangan pendidikan melalui mekanisme politik di ruang rapat DPR/D. Tanpa dukungan DPR/D untuk menggugat lembaga dan cara kerja pihak eksekutif dalam mengurus mutu pendidikan, agaknya RISE akan bernasib sama dengan berbagai proyek penelitian dan bantuan pendidikan di Indonesia selama ini yang berlalu tanpa menghasilkan perbaikan signifikan.

Berbagai harapan di balik penelitian SMERU hanya dapat dicapai melalui kerja keras staf dan dukungan pengorganisasian yang cermat oleh manajemen. Khusus untuk kegiatan SMERU pada 2017, bantuan keuangan lembaga internasional dan kerja sama pejabat penyusun kebijakan publik telah mempermudah pekerjaan SMERU. Misalnya, dana hibah dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia, melalui program Knowledge Sector Initiative (KSI) selama ini terekam istimewa dalam sejarah perkembangan SMERU dan kemajuan penelitian sosial di Indonesia. Untuk bisa bekerja maksimal, SMERU sebagai sentra pengetahuan masih membutuhkan dana hibah seperti itu agar tetap dapat berprakarsa untuk merancang dan melaksanakan kegiatan penelitian yang penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. SMERU berprinsip bahwa cita-cita bersama penanggulangan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui penelitian yang baik dan kerja sama erat antarsemua pemangku kepentingan. Atas semua bantuan dan kerja sama berbagai pihak selama ini, saya atas nama Pembina Yayasan SMERU menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. ■

Dr. Syaikhul Usman

Ketua Pembina



SAMBUTAN MANAJEMEN

Meskipun jumlah dan kualitas penelitian di Indonesia terus meningkat, belum banyak hasil-hasil penelitian yang digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan. Melihat pentingnya pemanfaatan bukti dan rekomendasi dari hasil penelitian untuk memperkaya perspektif pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sepanjang 2017 SMERU secara intensif melibatkan diri dalam proses perumusan berbagai kebijakan, khususnya yang terkait dengan upaya mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Di antara hasil-hasil penelitian yang disampaikan sebagai masukan penyusunan kebijakan adalah dari penelitian terkait pelaksanaan Undang-Undang Desa, pengembangan kehidupan berkelanjutan, ketimpangan kota-desa, kemiskinan perdesaan, kesetaraan gender, dan disabilitas.

Secara aktif, SMERU menyampaikan masukan dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait melalui diskusi-diskusi yang dilaksanakan berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, SMERU juga berinisiatif menyelenggarakan seri diskusi kebijakan untuk memfasiliasi dialog antara pembuat kebijakan dan peneliti, akademisi, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lain. Acara Temu Berbagi Penelitian yang diselenggarakan pada Februari 2017 di Mataram dan Forum Kajian Pembangunan pada Oktober 2017 di Jakarta merupakan dua kegiatan utama SMERU dalam memfasilitasi dialog tersebut. Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyelenggaraan acara Temu Berbagi Penelitian di Mataram merupakan perwujudan upaya SMERU untuk mendukung pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan di daerah, khususnya dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Di tahun-tahun mendatang, SMERU akan lebih mengintensifkan komunikasi dan dialog dengan pemangku kepentingan di daerah dan dengan sektor swasta. SMERU akan menjajaki kemungkinan kerja sama penelitian untuk mengkaji permasalahan kemiskinan di daerah dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dengan sektor swasta, SMERU akan mencoba mengeksplorasi kemungkinan kerja sama untuk mendorong partisipasi sektor ini dalam mencapai pembangunan inklusif.

Selain itu, SMERU juga akan terus meningkatkan kontribusinya dalam penyusunan kebijakan-kebijakan nasional. Mulai tahun depan, pemerintah akan memulai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Hal ini merupakan momentum yang penting bagi SMERU untuk berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, SMERU akan terus melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta terus aktif menyampaikan hasil-hasil penelitiannya dan memfasilitasi dialog-dialog kebijakan.

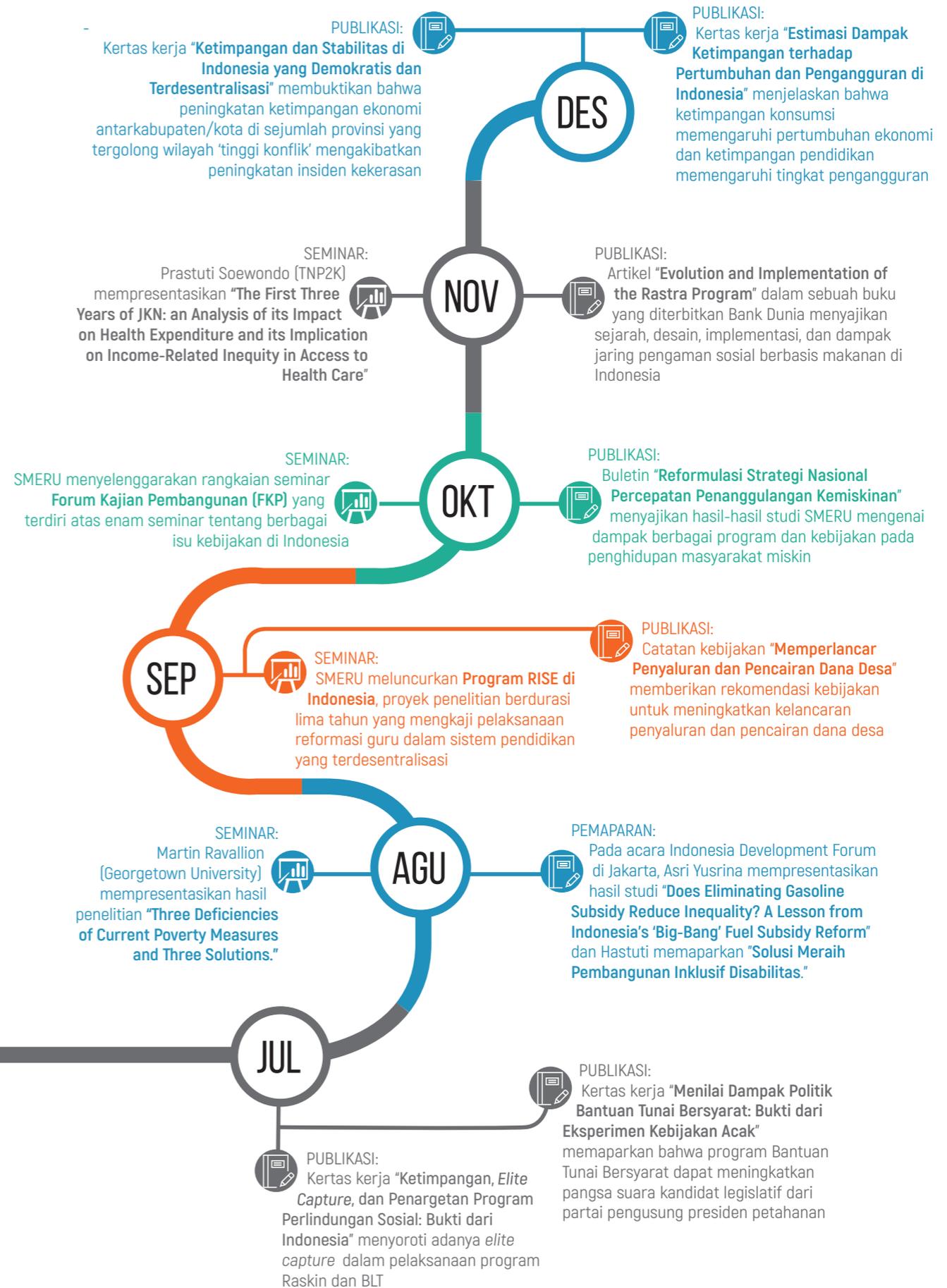
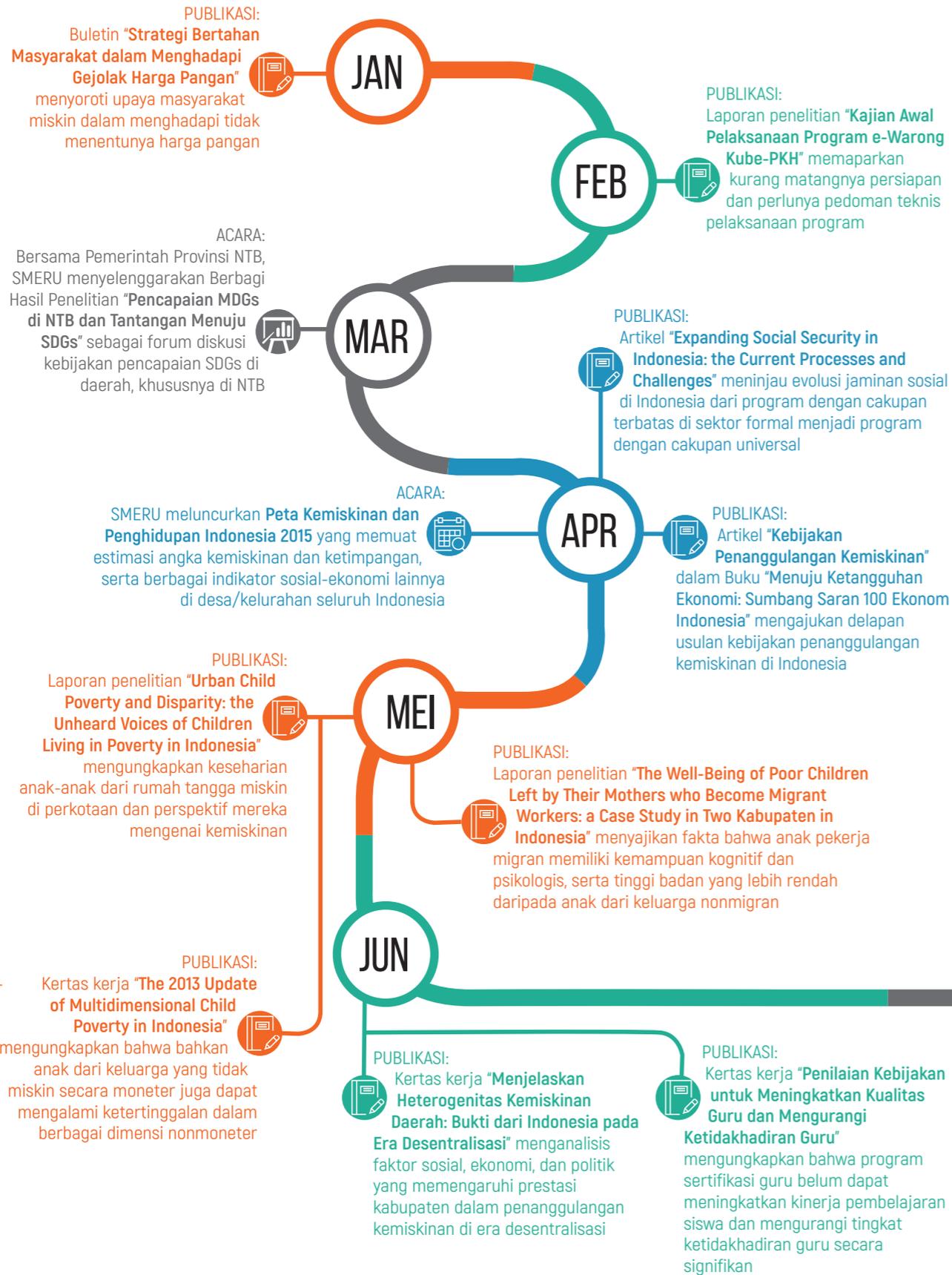
Untuk bisa meningkatkan kegiatan penelitian dan diskusi-diskusi kebijakannya, SMERU terus mengembangkan organisasi dan menambah jumlah stafnya. Pengembangan ini juga didukung upaya-upaya SMERU untuk menjaga kualitas kerja dan meningkatkan kemandirian finansial. Untuk itu, SMERU melakukan evaluasi paruh waktu Rencana Strategis SMERU 2015–2019 pada Oktober 2017 dan merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam dua tahun ke depan.

Berbagai perkembangan yang telah dialami SMERU hingga 2017 dan rencana pengembangan lembaga tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas SMERU dalam memproduksi hasil penelitian berkualitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan donor untuk terus bekerja sama dengan SMERU. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf atas kerja keras dan dedikasinya, Pembina dan Pengawas Yayasan SMERU atas arahan dan bimbingannya, serta seluruh mitra SMERU atas dukungan dan kerja samanya. ■

Dr. Asep Suryahadi

Direktur

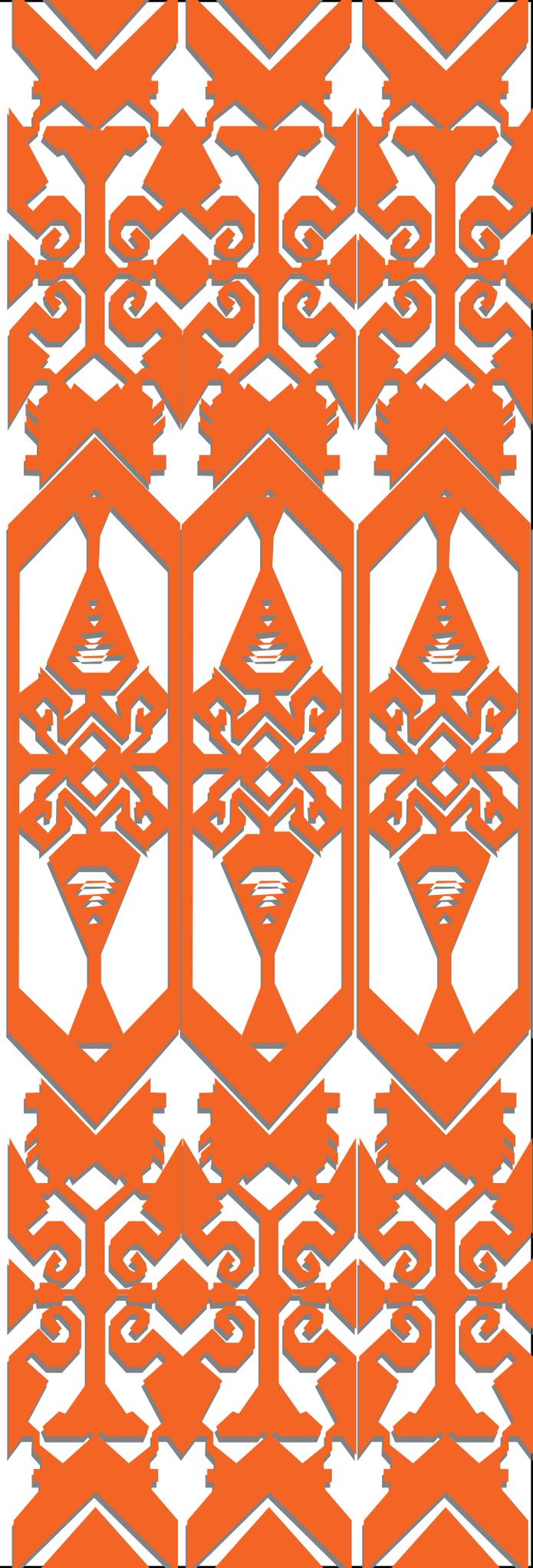
MOMEN PENTING SMERU 2017

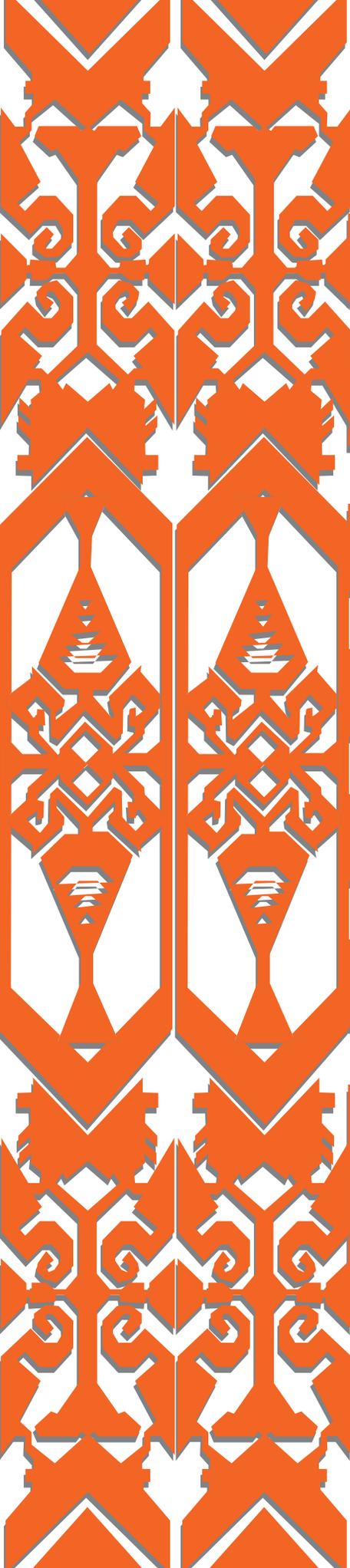


MOTIF SUBAHNALE

SUBAHNALE berasal dari kata **Subhanallah**. Dari ungkapan kekaguman terhadap kebesaran Allah itu, lahirlah motif yang disebut subahnale. Motif subahnale berupa susunan geometris segi enam seperti sarang lebah dengan isian bunga. Motif ini merupakan salah satu motif kuno tenun Nusa Tenggara Barat. Kerumitan dan keindahan motifnya diakui dunia dan kain-kain terbaik dengan motif ini digunakan untuk upacara khusus atau beribadah.

Sumber: <http://nationalgeographic.grid.id>





PETA CAKUPAN WILAYAH
PENELITIAN SMERU 2017

1

TENTANG SMERU

3

SAMBUTAN

4

MOMEN PENTING SMERU 2017

8

KEGIATAN UTAMA KAMI

12

JEJARING SMERU 2017

24

ORGANISASI KAMI

28

LAPORAN KEUANGAN SMERU
TAHUN 2016 & 2017

34

PROGRAM RISE DI INDONESIA: EVALUASI REFORMASI GURU DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN

Indonesia telah mencapai kesetaraan gender dalam angka partisipasi siswa di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun, meski Indonesia telah melakukan investasi yang signifikan dalam bidang pendidikan selama lebih dari satu dekade, kualitas pendidikan di negara ini tetap belum memperlihatkan peningkatan yang berarti. Hasil skor PISA, suatu penilaian internasional yang diinisiasi oleh OECD, memperlihatkan Indonesia berada di posisi nyaris paling bawah; lebih dari 75% siswa di Indonesia tidak menguasai kemampuan dasar matematika. Hasil tes internasional lain, yaitu TIMSS, menunjukkan kemampuan matematika siswa kelas 8 di Indonesia menurun antara 2007 dan 2011. Padahal, dalam kurun waktu itulah Indonesia secara signifikan meningkatkan investasi di bidang pendidikan.

Di antara banyak faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut, kualitas pengajaran menjadi perhatian utama. Dari hasil tes pengetahuan muatan pengajaran dan pedagogi yang diikuti oleh hampir 3 juta guru di Indonesia terlihat bahwa 60% dari mereka tidak lulus. Selain itu, meskipun guru-guru menerima peningkatan penghasilan yang signifikan setelah adanya program Sertifikasi Guru, sebanyak 10–11% dari mereka tetap tidak berada di ruang kelas saat kegiatan belajar-mengajar semestinya berlangsung. Oleh karena itu, tantangan langsung yang dihadapi sistem pendidikan Indonesia adalah bagaimana menggunakan sumber daya di tingkat nasional dan kabupaten/kota dengan efektif guna meningkatkan kualitas pengajaran dan—pada akhirnya—pembelajaran siswa.

Sejak 2017 SMERU memimpin Program *Research on Improving Systems of Education* (RISE) di Indonesia yang berdurasi lima tahun, bermitra dengan The Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) dan Mathematica Policy Research (Mathematica). Program RISE menerapkan studi global di enam negara dengan pendanaan dari DFID dan DFAT.

Secara umum, Program RISE di Indonesia terdiri atas dua bidang kajian berikut:

1. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penempatan, perekrutan, dan pelatihan (baik pelatihan prajabatan maupun pelatihan berkelanjutan dalam jabatan) guru, serta skema tunjangan guru meningkatkan pembelajaran siswa? Bagaimana desentralisasi kewenangan ke kabupaten/kota memengaruhi keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut?
2. Reformasi apa yang dilakukan berbagai kabupaten/kota inovatif yang berfokus pada peningkatan pembelajaran, dan bagaimana hasilnya? Apakah kabupaten/kota tersebut mengalami kemajuan dalam meningkatkan pembelajaran siswa sepanjang periode studi? Apakah inovasi yang diterapkan menyebar ke kabupaten/kota lain, dan hingga ke kebijakan nasional?

Bersama para mitranya, SMERU akan melakukan serangkaian studi tentang reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi pendidikan di kabupaten/kota dalam kerangka kerja yang terpadu. RISE akan menganalisis kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kualitas guru dan—jika memungkinkan—peningkatan pembelajaran siswa, baik untuk anak-anak yang tinggal di kota maupun di desa-desa terpencil. SMERU juga akan mempelajari bagaimana berbagai kabupaten/kota dengan sumber daya dan aksesibilitas yang berbeda-beda merumuskan kebijakan dan memunculkan inovasi, untuk memberikan wawasan mengenai seberapa efektif kebijakan kabupaten/kota dapat diadopsi dalam skala berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing kabupaten/kota. ■



PROGRAM RISE DI INDONESIA AKAN MENGAJAI

1. REFORMASI GURU



Rekrutmen & Distribusi Guru



Diklat Prajabatan Guru



Pembinaan & Pengembangan Profesi Guru dalam Jabatan



Identifikasi Kinerja Baik & Pemberian Penghargaan (KIAT Guru)



Analisis Dampak Ujian Nasional



Serikat Guru

2. INOVASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN



Inovasi di Tingkat Kabupaten/Kota



Dampak Kebijakan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota



Penyebaran Inovasi Kebijakan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota

MENELUSURI MANFAAT BELANJA DESA

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kebijakan tentang desa tidak banyak memberi ruang bagi desa untuk mengembangkan potensinya. Dengan lahirnya UU yang baru ini, muncul harapan baru untuk kemajuan desa karena UU ini menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Dengan dasar ini, sejak September 2015 The SMERU Research Institute melakukan studi longitudinal pemantauan pelaksanaan UU tentang Desa berdurasi tiga tahun dengan dukungan Local Solution to Poverty (LSP), Bank Dunia. Salah satu topik yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah manfaat belanja APBDes 2015–2016, termasuk aliran dananya, dan faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan distribusi manfaat di sepuluh desa yang berlokasi di lima kabupaten (Banyumas, Wonogiri, Merangin, Batanghari, dan Ngada).

Berkaitan dengan isu tersebut, kajian ini menemukan tiga hal utama. Pertama, pemanfaatan anggaran belum optimal dalam mengurangi kemiskinan karena perencanaan pembangunan desa masih miskin gagasan. Sebagian besar belanja desa dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan talud. Hal ini terutama terjadi karena pembangunan fisik masih dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan pemerintah desa. Sementara itu, akibat rendahnya pemahaman pihak internal desa maupun supradesa tentang makna pemberdayaan serta kurangnya dukungan warga akibat terbatasnya penerima manfaat, maka kegiatan pemberdayaan kurang mendapat prioritas.

Kedua, sebagian besar alokasi belanja pembangunan fisik mengalir ke luar desa, yaitu untuk belanja alat dan bahan bangunan (65%–90%), walau masih di lingkungan perdesaan (desa tetangga atau kecamatan terdekat). Sementara itu, dana yang digunakan untuk belanja di dalam desa hanya sebesar 10%–30%, yaitu untuk biaya upah.

Ketiga, akibat perencanaan yang belum efektif, kegiatan pembangunan fisik masih dilakukan secara sporadis dan tersebar di banyak tempat namun tidak terintegrasi. Sporadisitas kegiatan pembangunan fisik terjadi karena upaya yang dilakukan hanya sekadar memecahkan masalah di hadapan mata secara instan, tanpa mempertimbangkan optimalisasi potensi desa dalam jangka panjang. Selain itu, desa-desa pada umumnya masih mengedepankan asas pemerataan dalam hal kesempatan mendapat pembangunan fisik bagi seluruh dusun, bahkan seluruh RT. Akibatnya, infrastruktur fisik yang terbangun tidak saling mendukung antardusun.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan belanja desa, hal-hal berikut perlu dilakukan: (i) pembenahan kualitas perencanaan pembangunan desa agar lebih sistematis dan mampu mengoptimalkan potensi desa; (ii) penguatan peran pemerintah kabupaten dan para pendamping dalam mendorong pemanfaatan belanja desa untuk kegiatan inovatif, terutama pemberdayaan bagi kelompok marginal; dan (iii) pengembangan kawasan perdesaan dalam rangka memperkuat kerja sama antardesa yang berdasarkan pada potensi sumber daya masing-masing desa. ■

TEMUAN UTAMA STUDI MANFAAT BELANJA DESA

Pembangunan Fisik vs. Pemberdayaan



Aliran Dana ke Desa Lain



Anggaran Pembangunan Fisik Dibagi Rata



STUDI DIAGNOSTIK PEKERJA ANAK DI WILAYAH PERDESAAN (DENGAN PENEKANAN KHUSUS PADA PERTANIAN TEMBAKAU)

Di tengah upaya pemerintah untuk menghapuskan pekerja anak, informasi mengenai kondisi pekerja anak di Indonesia, khususnya di sektor tembakau, sangat terbatas. Berdasarkan hal tersebut, The SMERU Research Institute–bekerja sama dengan Elimination of Child Labour in Tobacco Growing (ECLT) Foundation–berupaya untuk memotret kondisi dan memahami akar penyebab keberadaan pekerja anak di dua kabupaten penghasil tembakau terbesar di Indonesia, Jember dan Lombok Timur.

Studi ini menemukan tingginya prevalensi pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau rakyat. Sebagian besar pekerja anak terpapar pekerjaan berbahaya, dengan hanya sebagian kecil yang menggunakan peralatan pelindung. Sebagian besar anak-anak ini masih bersekolah, dengan proporsi anak yang putus sekolah cenderung lebih tinggi pada kelompok usia yang lebih tua. Pekerja anak di perkebunan tembakau merupakan fenomena musiman yang mencapai puncaknya selama musim panen. Peluang untuk menjadi pekerja anak secara signifikan lebih tinggi pada anak yang berusia lebih tua, anak dari rumah tangga buruh tani, dan anak yang tinggal di dusun dengan prevalensi pekerja anak yang tinggi. Sementara itu, baik kepemilikan tanah maupun status kontrak dengan perusahaan tembakau tidak secara signifikan mengurangi peluang anak untuk terlibat dalam kerja di perkebunan tembakau.

Studi ini mengungkap bahwa tingginya prevalensi pekerja anak di desa-desa studi berakar pada norma dan kebiasaan setempat yang memandang keterlibatan anak di perkebunan tembakau sebagai hal yang positif dan menjadi bagian yang perlu dilakukan dalam proses mendidik anak untuk menjadi petani dan untuk memikul tanggung jawab. Di sisi lain, peraturan yang ada tidak memberikan penjelasan terperinci bagi anak-anak mengenai jenis-jenis pekerjaan di perkebunan tembakau yang dianggap berbahaya. Selain itu, kombinasi faktor-faktor berikut ini juga mendorong anak menjadi pekerja anak: (i) kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai dampak negatif menjadi pekerja anak dan terpapar pekerjaan berbahaya, (ii) kurangnya fasilitas yang memberi anak kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas lain, dan (iii) manfaat ekonomi bagi rumah tangga dan anak-anak itu sendiri. Sementara itu, kelebihan permintaan akan tenaga kerja selama musim panen tembakau juga menjadi faktor yang menarik banyak anak untuk bekerja.

Studi ini mengidentifikasi sumber daya yang ada dan dapat digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya yang lebih berkelanjutan dalam rangka menghapus pekerja anak di wilayah pertanian perdesaan, khususnya di perkebunan tembakau. Berdasarkan semua temuan studi ini, SMERU merekomendasikan langkah-langkah guna memperbaiki kebijakan nasional untuk penghapusan pekerja anak di perkebunan tembakau dan program percontohan yang dapat dimulai di Lombok Timur dan di Jember. ■

PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEMBAKAU

SIAPAKAH MEREKA?



Prevalensi terbanyak pada anak-anak berusia lebih tua (15-17 tahun)

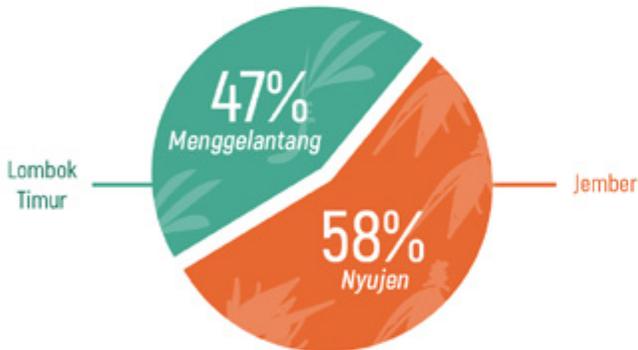


Tinggal di dusun dengan jumlah pekerja anak yang tinggi



Paling banyak ditemukan berasal dari keluarga buruh tani

APA YANG MEREKA LAKUKAN?



Mengelantang : Mengikat bundel-bundel daun tembakau
Nyujen : Membundel (dengan cara menusuk) daun-daun tembakau menggunakan tongkat

APA DAMPAK BAGI MEREKA?

Menyentuh dan menghirup daun tembakau segar dapat menyebabkan:



Mual & muntah



Sakit kepala



Pusing



Otot lemas



APA YANG HARUS DILAKUKAN?

- Menyinkronkan batas minimum usia pekerja anak antarundang-undang
- Merumuskan definisi yang jelas tentang pekerjaan ringan dan pekerjaan berbahaya terkait pekerja anak dalam berbagai aturan hukum
- Menyediakan fasilitas bermain atau mengadakan aktivitas lain agar anak dapat memanfaatkan waktu luang dengan baik
- Mensosialisasikan bahaya penyakit daun tembakau segar (*Green Tobacco Sickness*)
- Mereplikasi "Program Rumah Pintar" dan "Program Pasca-Jam Pelajaran" dari perusahaan tembakau

DARI PEKERJA RUMAH TANGGA MENJADI PEKERJA PENGASUHAN: MEMAHAMI DINAMIKA MOBILITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Wajah pekerja migran Indonesia saat ini masih didominasi perempuan-perempuan muda yang bekerja di ranah pekerjaan rumah tangga. Banyak di antara mereka pulang membawa masalah yang tidak hanya kompleks tetapi juga sensitif. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menaruh minat pada perubahan orientasi migrasi tenaga kerja ke arah pekerja terampil yang bekerja di industri yang lebih terlindungi. Salah satu upaya penting adalah mengirim lebih sedikit pekerja rumah tangga dan menggantinya dengan pekerja pengasuhan terampil. Studi ini membahas pertanyaan penelitian utama, "Bagaimanakah kemungkinannya di masa depan bagi pekerja rumah tangga untuk meningkatkan diri menjadi pekerja pengasuhan?"

Peralihan karier bagi pekerja migran Indonesia sangat dimungkinkan dengan tingginya permintaan akan pekerja pengasuhan di tingkat global dan berlimpahnya suplai di tingkat makro. Selain itu, dengan membuat standardisasi, pemerintah dapat mendorong calon pekerja migran untuk melakukan pekerjaan pengasuhan, alih-alih pekerjaan rumah tangga. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkat meso, tingginya biaya pelatihan yang ditanggung oleh perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) menyebabkan terhambatnya pergeseran karier pekerja migran ke arah kerja pengasuhan. Lebih jauh, di tingkat mikro, rendahnya tingkat pendidikan calon pekerja migran menghambat peningkatan karier mereka ke pekerja pengasuhan. Sementara itu, Program Peningkatan Kompetensi Calon TKI yang baru-baru ini diluncurkan belum mendukung peningkatan karier pekerja migran ataupun berfokus pada pekerjaan kesehatan. Dengan demikian, perbaikan dalam dua bidang ini perlu dilakukan.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disahkan, biaya pelatihan sekarang sudah ditanggung Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Namun, penting juga untuk digarisbawahi bahwa peningkatan kapasitas pusat-pusat pelatihan merupakan prioritas utama dalam menyediakan keterampilan yang relevan bagi calon pekerja migran.

Bukti-bukti dari studi ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah tingkat pendidikan yang rendah dapat meningkatkan peluang peningkatan karier bagi pekerja migran. Pekerja migran dengan tingkat pendidikan lebih baik berpeluang lebih tinggi dalam menaiki tangga karier menuju pekerja pengasuhan. Oleh karena itu, Indonesia harus mulai menerapkan standar pendidikan minimum bagi pekerja migran yang baru diterima.

Agenda penelitian tentang rantai pengasuhan global juga harus diberi prioritas yang lebih tinggi. Ketersediaan data baik di negara asal dan tujuan migrasi berguna bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik dalam penyediaan pengasuhan, dalam konteks pergeseran pola demografi. Selain itu, memahami dengan lebih menyeluruh permasalahan migrasi, penyediaan pengasuhan, dan pekerjaan sosial membutuhkan penelitian kualitatif untuk melengkapi keterbatasan statistik migrasi. ■



DARI PEKERJA RUMAH TANGGA MENJADI PEKERJA PENGASUHAN



KARAKTERISTIK PEKERJA RUMAH TANGGA

- Melakukan pekerjaan rumah tangga dengan **jam kerja tak tentu**
- Pemberi kerja adalah rumah tangga yang **tidak terikat dengan UU ketenagakerjaan**
- **Konflik muncul** ketika pekerja tinggal di rumah majikan

PENINGKATAN KARIR MENJADI PEKERJA PENGASUHAN

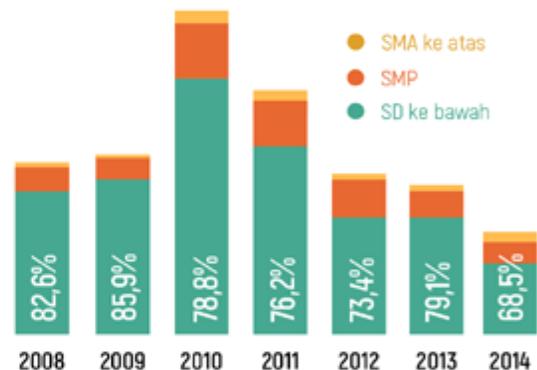
- Partisipasi perempuan yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja
- Permintaan akan pekerja pengasuhan yang lebih tinggi karena perubahan demografi
- Pekerja pengasuhan membutuhkan keterampilan khusus untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi



RELEVANSI PENDIDIKAN

Latar belakang pendidikan rendah menghasilkan **keterampilan yang rendah** dan berkontribusi pada tingkat **kekerasan dalam rumah tangga** yang lebih tinggi

JUMLAH MIGRAN MENGADUKAN MASALAH SAAT KEDATANGAN DI TANAH AIR



Sumber: Perhitungan Palmira Permata Bachtar berdasarkan data kedatangan migran 2008-2014 yang dikumpulkan BNP2TKI (tidak dipublikasikan)

APA YANG HARUS DILAKUKAN?

Syarat Pendidikan

Menerapkan batas minimum pendidikan untuk migran baru dipekerjakan

Peningkatan Keterampilan

Meningkatkan program pengembangan keterampilan di tingkat nasional

Pusat Pelatihan

Meningkatkan kapasitas pusat pelatihan di tingkat lokal

KAJIAN AWAL PELAKSANAAN PROGRAM E-WARONG KUBE-PKH

Pada April 2016 Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para menteri mengenai (i) pentingnya mewujudkan sistem keuangan nasional yang inklusif dan (ii) penyaluran semua bantuan sosial (bansos) dan subsidi secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol, pemantauan, dan mengurangi penyimpangan. Terkait hal ini, Kementerian Sosial menerjemahkannya dengan meluncurkan program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong Kube-PKH atau e-Warong) sebagai sarana untuk menyalurkan bantuan sosial nontunai tersebut. Tujuannya, antara lain, untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan meningkatkan akses keluarga miskin ke pelayanan keuangan inklusif.

Untuk mengetahui pelaksanaan program e-Warong, pada Oktober 2016 The SMERU Research Institute, atas permintaan Bappenas dan bekerja sama dengan KOMPAK, melakukan kajian awal di lima kabupaten/kota (Kediri, Batam, Balikpapan, Malang, dan Denpasar). Kajian tersebut bertujuan: (i) mengetahui persepsi para pemangku kepentingan terhadap konsep Program e-Warong, (ii) mengetahui kesiapan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program e-Warong, dan (iii) menyediakan bahan masukan dan pembelajaran untuk memperbaiki pelaksanaan Program e-Warong.

Pelaksanaan Program e-Warong merupakan hasil kerja sama Kementerian Sosial dengan berbagai pihak, yakni bank pelaksana (saat studi dilakukan terdiri atas BNI dan BRI), Bulog, dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS). Secara singkat, peran pihak-pihak tersebut adalah: (i) Kementerian Sosial merupakan penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan program, (ii) bank pelaksana menyediakan sarana transaksi digital dan menerbitkan kartu keluarga sejahtera untuk menjalankan transaksi nontunai di e-Warong, (iii) Bulog menjadi distributor yang memasok bahan pokok ke e-Warong, dan (iv) KMIS yang beranggotakan keluarga penerima manfaat PKH berperan sebagai wakil e-Warong dalam melakukan kerja sama dengan bank pelaksana dan Bulog.

Para pemangku kepentingan menyatakan bahwa program e-Warong Kube-PKH secara operasional layak dilaksanakan. Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa persiapan pelaksanaannya belum matang. Hal ini tecermin dari, antara lain, belum adanya kelengkapan regulasi program seperti pedoman umum, petunjuk teknis operasional maupun kejelasan kerja sama antarpihak terkait. Akibatnya, tingkat pemahaman pemangku kepentingan tentang konsep e-Warong dan kualitas pelaksanaan program bervariasi antarlokasi studi. Dengan demikian, selain kelengkapan regulasi, keberhasilan pelaksanaan e-Warong Kube-PKH ke depan memerlukan beberapa prasyarat terkait pembangunan dan pemantapan organisasi, pengelolaan fungsinya sebagai titik distribusi bantuan sosial nontunai, agen bank, dan komponen penghidupan masyarakat miskin, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. ■

Program e-Warong Kube-PKH

Agen Bank



Pencairan Bantuan Sosial



Pembayaran Tagihan Listrik



Pembayaran Tagihan PAM



Pembelian Pulsa

Pemasaran Hasil Produksi



Produk Olahan



Hasil Pertanian

Koperasi Simpan Pinjam



Pembelian Barang



Tabungan



Pinjaman



APA KENDALANYA?

Belum ada juklak dan juknis program



Persiapan pelaksanaan program berlangsung terlalu singkat



Pemangku kepentingan belum paham mengenai konsep program



Pelatihan bagi pengelola e-Warong masih kurang

PUBLIKASI SMERU 2017



KETENAGAKERJAAN

Bachtiar, Palmira Permata dan Dinar Dwi Prasetyo (2017) 'Return Migration and Various Reintegration Programs for Low-Skilled Migrant Workers in Indonesia.' Laporan penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.



PEMBANGUNAN DESA

Sedyadi, Gema Satria Mayang dan Widjajanti Isdijoso (2017) 'Memperlancar Penyaluran dan Pencairan Dana Desa.' Catatan kebijakan Seri UU Desa No. 3/2017. Jakarta: The SMERU Research Institute.



PENDIDIKAN

Suryahadi, Asep dan Prio Sambodho (2017) 'Penilaian Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Guru dan Mengurangi Ketidakhadiran Guru.' Kertas kerja. Jakarta: The SMERU Research Institute.



SDGs

The SMERU Research Institute (2017) 'Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret.' Buletin SMERU No. 1/2017. Jakarta: The SMERU Research Institute.



PERLINDUNGAN SOSIAL

Sim, Armand, Radi Negara, dan Asep Suryahadi (2017) 'Ketimpangan, Elite Capture, dan Penargetan Program Perlindungan Sosial: Bukti dari Indonesia.' Kertas kerja. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Tobias, Julia E., Sudarno Sumarto, dan Habib Moody (2017) 'Menilai Dampak Politik Bantuan Tunai Bersyarat: Bukti dari Eksperimen Kebijakan Acak.' Kertas kerja. Jakarta: The SMERU Research Institute.



KEMISKINAN & KETIMPANGAN SOSIAL

Sumarto, Sudarno, Marc Vothknecht, dan Laura Wijaya (2017) 'Menjelaskan Heterogenitas Kemiskinan Daerah: Bukti dari Indonesia pada Era Desentralisasi.' Kertas kerja. Jakarta: The SMERU Research Institute.

The SMERU Research Institute (2017) 'Reformulasi Strategi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.' Buletin SMERU No. 1/2017. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Yumna, Athia, M. Fajar Rakhmadi, M. Firman Hidayat, Sarah E. Gultom, dan Asep Suryahadi (2017) 'Mengestimasi Dampak Ketimpangan terhadap Pertumbuhan dan Pengangguran di Indonesia.' Kertas kerja. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Tadjoeddin, Mohammad Zulfan, Athia Yumna, Sarah E. Gultom, M. Fajar Rakhmadi, M. Firman Hidayat, dan Asep Suryahadi (2017) 'Ketimpangan dan Stabilitas di Indonesia yang Demokratis dan Terdesentralisasi.' Kertas kerja. Jakarta: The SMERU Research Institute.



KEMISKINAN PADA ANAK

Bima, Luhur, Cecilia Marlina, Rachma Indah Nurbani, Emmy Hermanus, Rendy Adriyan Diningrat, dan Sofni Indah Arifa Lubis (2017) 'Unheard Voices of Children Living in Poverty in Indonesia.' Draft laporan penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Bima, Luhur dan Cecilia Marlina (2017) 'The 2013 Update of Multidimensional Child Poverty in Indonesia.' Draft kertas kerja. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Rizky, Mayang, Yudi Fajar M. Wahyu, Hafiz Arfyanto, Sofni Indah Arifa Lubis, Emmy Hermanus, Joseph Natanael Marshan, Nita Warda, Niken Kusumawardhani, dan Nina Toyamah (2017) 'The Well-Being of Poor Children Left by Their Mothers who Become Migrant Workers: Case Study in Two Kabupaten in Indonesia.' Draft laporan penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.

DATA ORNOP DALAM BASIS DATA SMERU

DATA BERDASARKAN LOKASI



DATA BERDASARKAN SEKTOR



JEJARING SMERU 2017

BERBAGI PENGETAHUAN

PENDANAAN PENELITIAN

PENELITIAN BERSAMA

- + Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- + Mathematica Policy Research
- + The Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD)
- + McGill University

- + Yayasan TIFA
- + International Institute for Sustainable Development (IISD)
- + Bank Dunia
- + Asian Development Bank (ADB)
- + Japan International Cooperation Agency (JICA)
- + Knowledge Sector Initiative (KSI)-DFAT
- + Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- + Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)-DFAT
- + Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU)-DFAT
- + Eastern Indonesia National Roads Improvement Project (EINRIP) - DFAT
- + Ford Foundation
- + Partnership for Economic Policy (PEP)
- + Save the Children
- + Eliminating Child Labour in Tobacco Growing Foundation (ECLT)

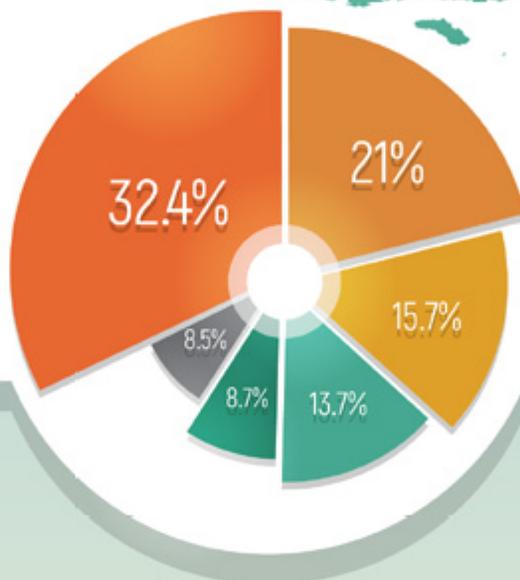
- + Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM)-Universitas Indonesia
- + Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- + Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
- + Article 33
- + Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA)-Universitas Indonesia
- + Center for Sustainable Development Goals Studies-Universitas Padjadjaran
- + CCPHI - Partnership for Sustainable Community
- + Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA)
- + Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- + Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- + Kementerian Agama
- + Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- + Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- + Kementerian Keuangan
- + Kementerian Ketenagakerjaan
- + Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- + Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- + Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
- + Dewan Ketahanan Pangan
- + Lembaga Administrasi Negara
- + PKPU Human Initiative
- + Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- + Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- + Universitas Jember
- + Forum Kajian Pembangunan (FKP)
- + Aliansi Riset Kebijakan (ARK) Indonesia
- + Jaringan Peduli Anak (JPAI)
- + Sahabat SMERU
- + Evidence-based Policy in Development Network (EBPDN)
- + Indonesia Development Research Network (IDRN)
- + Kawal Pendidikan

- + Aliansi
- + Sektor Swasta & Ornop
- + Universitas & Lembaga Penelitian
- + Pemerintah Pusat & Daerah
- + Lembaga Bilateral/Multilateral & Program Donor

KETERLIBATAN SMERU DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN



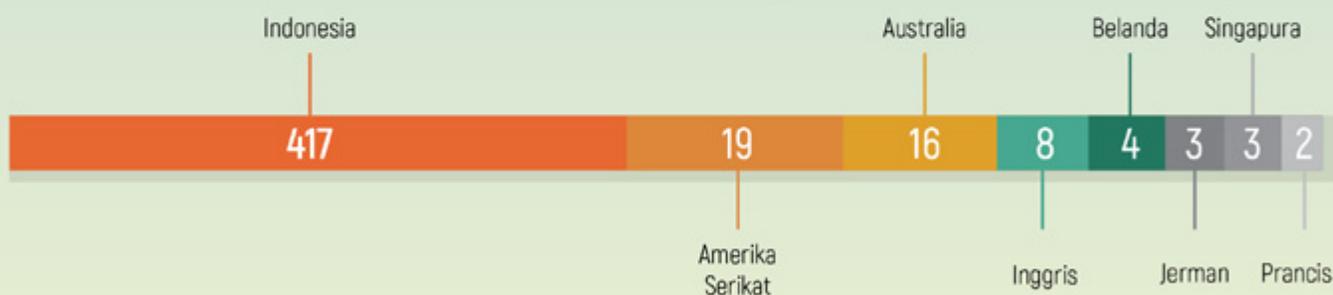
KOMPOSISI PENGGUNA PETA KEMISKINAN 2015



Universitas
Lembaga Pemerintah
Asosiasi & LSM

Lembaga Penelitian
Lembaga Donor
Lainnya (Individu, Media,
Sektor Swasta, dll)

PENGGUNA TERBANYAK BERDASARKAN NEGARA



PENGGUNA LAINNYA



SMERU DI INTERNET



SITUS WEB RESMI

JUMLAH PENGUNJUNG PADA 2017



SIAPA SAJA PENGUNJUNGNYA?



LAPORAN PALING BANYAK DIBACA:

Urban Child Poverty and Disparity: The Unheard Voices of Children Living in Poverty in Indonesia Research Report, May 2017 (380 views)



FACEBOOK



2.799 LIKES

29% ↑ sejak akhir 2016



2.839 FOLLOWERS

32% ↑ sejak akhir 2016



Paling populer di kalangan pengguna Facebook berumur 25-34 tahun



TWITTER



1811 FOLLOWERS

35% ↑ sejak akhir 2016



17.232 PROFILE VISITS

75% ↑ sejak akhir 2016



YOUTUBE



181 SUBSCRIBERS

170% ↑ sejak akhir 2016

10.162 VIEWS

20% ↑ sejak akhir 2016

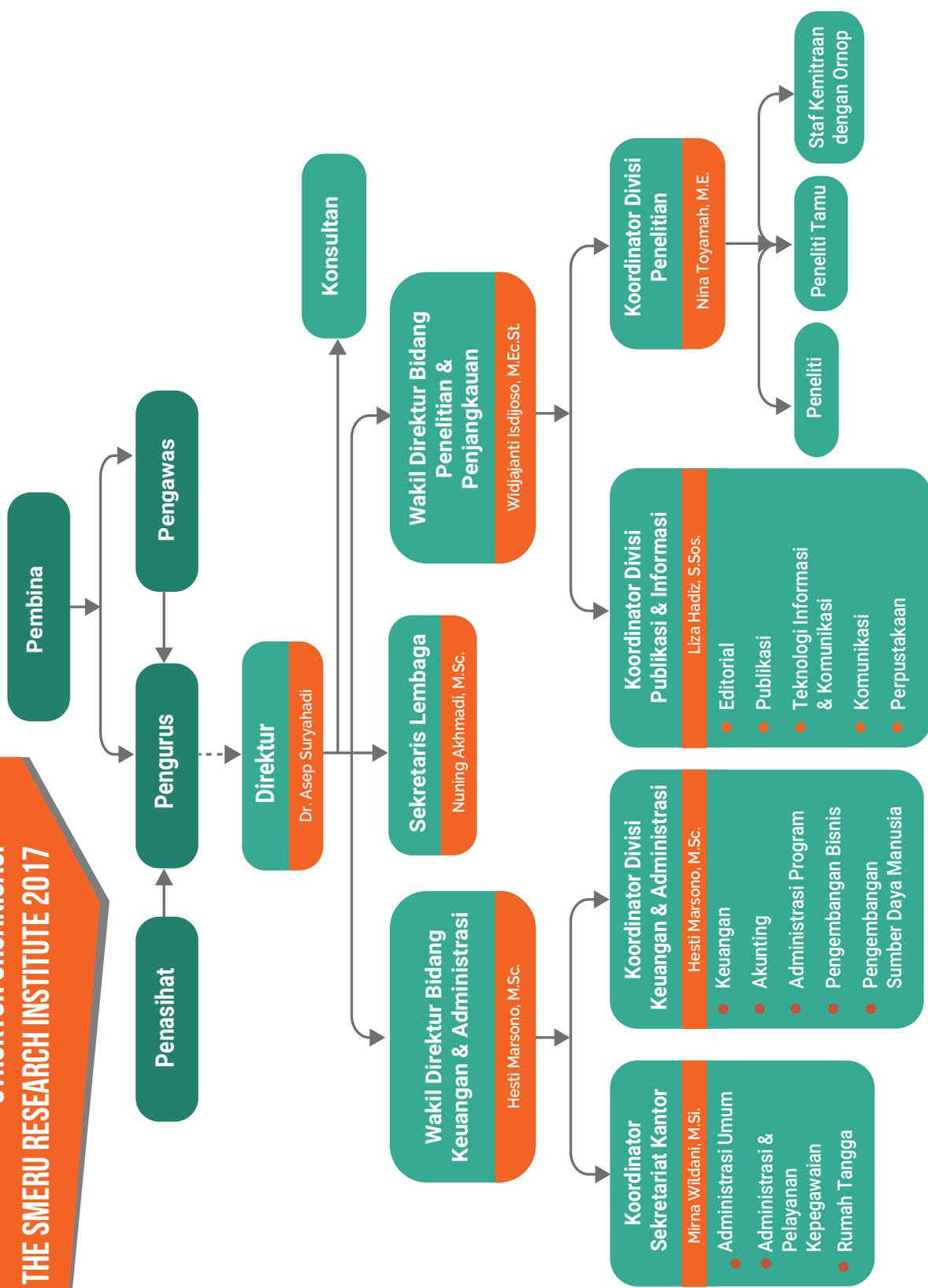
PALING BANYAK DITONTON:

Launching - Poverty and Livelihood Map of Indonesia 2015 (408 views)



Keluarga besar SMERU dalam acara Annual Strategic Meeting 2017 di Lampung

STRUKTUR ORGANISASI THE SMERU RESEARCH INSTITUTE 2017



YAYASAN SMERU

PEMBINA

Dr. Syaikhu Usman	Ketua	The SMERU Research Institute, Jakarta
Gregory Churchill, JD	Wakil Ketua	Konsultan hukum & dosen (purnatugas)
Dr. Joan Hardjono	Anggota	Peneliti independen, Bandung
Dr. Sudarno Sumarto	Anggota	The SMERU Research Institute & TNP2K, Jakarta
Dr. Syarif Hidayat	Anggota	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta
Dr. Chris Manning	Anggota	The Australian National University, Canberra, Australia
Dr. Ruth Stella Petrunella Thei	Anggota	Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Lombok

PENGURUS

Dr. Asep Suryahadi	Ketua	The SMERU Research Institute, Jakarta
Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St.	Wakil Ketua	The SMERU Research Institute, Jakarta
Nuning Akhmadi, M.Sc.	Sekretaris	The SMERU Research Institute, Jakarta
Hesti Marsono, M.Sc.	Bendahara	The SMERU Research Institute, Jakarta

PENGAWAS

Dr. Ilyas Saad	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta
Bambang Sulaksono, M.M.	The SMERU Research Institute, Jakarta

PENASIHAT

Prof. Boediono	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Dr. Chris Manning	The Australian National University, Canberra, Australia
Prof. James J. Fox	The Australian National University, Canberra, Australia
Dr. Joan Hardjono	Peneliti independen, Bandung
Prof. Gavin W. Jones	National University of Singapore, Singapura
Prof. Gustav F. Papanek	Boston Institute for Developing Economies, Boston, Amerika Serikat
Prof. Lant H. Pritchett	Harvard University, Cambridge MA, Amerika Serikat
Prof. Mohamad Ikhsan	Universitas Indonesia, Jakarta
Dr. Solita Sarwono	Konsultan lepas, Wassenaar, Belanda



Toni Parwanto/SMERU

THE SMERU RESEARCH INSTITUTE

MANAJEMEN

DIREKTUR

Dr. Asep Suryahadi

WAKIL DIREKTUR BIDANG PENELITIAN & PENJANGKAUAN

Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St.

WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMINISTRASI & KEUANGAN

Hesti Marsono, M.Sc.

SEKRETARIS LEMBAGA

Nuning Akhmadi, M.Sc.

DIVISI PENELITIAN

KOORDINATOR

- Nina Toyamah, M.E.

PENELITI UTAMA

- Dr. Sudarno Sumarto
- Dr. Syaikhu Usman

PENELITI SENIOR

- Akhmadi, M.Si.
- Athia Yumna, M.Sc.
- Bambang Sulaksono, M.M.
- Dr. Daniel Suryadarma
- Luhur Bima, M.Sc.
- M. Sulton Mawardy, M.Comm.
- Muhammad Syukri, M.Si.
- Palmira Permata Bachtiar, M.Phil.
- Rachma Indah Nurbani, M.A.
- Dr. Stella Aleida Hutagalung

PENELITI

- Ana Rosidha Tamyis, M.M.
- Asep Kurniawan, S.I.P.
- Asri Yusrina, MEcon
- Dinar Dwi Prasetyo, M.Sc.
- Dyan Widyaningsih, S.Sos.
- Emmy Hermanus, MPH
- Gema Satria Mayang Sedyadi, M.S.
- Ir. Hastuti
- Joseph Nathanael Marshan, M.Ec.

- Mayang Rizky, M.Sc.

- Meuthia Rosfadhila, M.P.P.

- Michelle Andrina, M.S.E.

- Niken Kusumawardhani, M.Sc.

- Nila Warda, M.Ec Pol

- Rendy Adriyan Diningrat, M.Eng.

- Rika Kumala Dewi, MDS

- Ruhmaniyati, S.E.

- Ulfah Alifia, M.Si.

- Valentina Y. D. Utari, MDS

- Yudi Fajar M. Wahyu, M.A.

PENELITI JUNIOR

- Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, S.E.

- Anisah Hafiszha Zulfa, S.E.

- Elza Samantha Elmira, MPH (Adv)

- Fatin Nuha Astini, M.AP

- I Wayan Arya Swarnata, S.E.

- Mirza Annisa Izati, M.A.

- Nurmala Selly Saputri, SKM

- Rezanti Putri Pramana, B.Sc.

- Ridho Al Izzati, S.E.

- Veto Tyas Indrio, S.E.

STAF KEMITRAAN ORNOP

- Ir. Hariyanti Sadaly

DIVISI PUBLIKASI & INFORMASI

KOORDINATOR

- Liza Hadiz, S.Sos.

PENERJEMAH/EDITOR SENIOR

- Budhi Adrianto, S.T.
- Mukti Mulyana, S.I.P.

PENERJEMAH/EDITOR

- Gunardi Handoko
- Bryanna Wilson, B.A.

STAF PUBLIKASI & DISTRIBUSI

- Heru Sutapa, S.Kom.

STAF PUBLIKASI & DESAIN

- Novita Maizir, S.Sos.

STAF TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI SENIOR

- Bambang C. Hadi, M.Sc.

STAF TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI JUNIOR

- Toni Parwanto, S.Kom.

STAF KOMUNIKASI

- Ratri Indah Septiana, M.A.

PUSTAKAWAN

- Stevanus Yulyanto, S.Hum.

DIVISI KEUANGAN & ADMINISTRASI

KOORDINATOR

- Hesti Marsono, M.Sc.

STAF KEUANGAN SENIOR

- Rusky Aviandhi, M.M.

STAF AKUNTING SENIOR

- Aris Kustanto, S.E.

KOORDINATOR SEKRETARIAT KANTOR

- Mirna Wildani, M.Si.

ASISTEN KANTOR

- Aang Ahbari
- Abdul Rokhim
- Dakim
- Gogo Margo

SOPIR

- E. Muchtar

MANAJER PROGRAM – PROGRAM RISE

- Aaron Situmorang, M.A.

STAF PROGRAM – PROGRAM RISE

- Nadya Novitri, S.Sos.

STAF ADMINISTRASI PROGRAM JUNIOR

- Felisita Lethe, S.Ip

STAF ADMINISTRASI KANTOR

- Mardiani

ASISTEN ADMINISTRASI KANTOR

- Supriyadi

SATPAM

- Abdul Hakim
- Adi Panca
- Eka Permana
- Subiyantoro



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
 Certified Public Accountants
 License No. : 951/KM.1/2010

Jl. Pluit Raya 200 Blok V No. 1-5 Jakarta - 14440 Indonesia
 Tel. : (62-21) 661-7155 Fax. : (62-21) 663-0455
 E-mail : jmkkt@johanmalonda.com www.johanmalonda.com
 With Offices in Surabaya, Medan and Bali



www.bakertillyinternational.com

Laporan No. 18334-A3Y/JMM2.JY2

Report No. 18334-A3Y/JMM2.JY2

Badan Pengurus
THE SMERU RESEARCH INSTITUTE
(SMERU)

Board of Management
THE SMERU RESEARCH INSTITUTE
(SMERU)

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan SMERU terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta Laporan Aktivitas dan Perubahan Aset Bersih dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying Financial Statements of SMERU, which comprise the Statement of Financial Position as of December 31, 2016, and the Statements of Activities and Changes in Net Assets and Cash Flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Management's Responsibility for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan ini sesuai dengan basis Kas yang dimodifikasi yang dijabarkan pada Catatan 2 yang menyatakan bahwa basis Kas yang dimodifikasi adalah basis yang diterima untuk penyusunan Laporan Keuangan dalam keadaan ini, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these Financial Statements in accordance with the modified cash basis of accounting as described in Note 2 determining that the modified cash basis is an acceptable basis for preparation of the Financial Statements in the circumstances, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Auditor's Responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah Laporan Keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Insitut of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are free from material misstatement.



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam Laporan Keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, Laporan Keuangan yang disebutkan diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Posisi Keuangan SMERU per 31 Desember 2016 dan Laporan Aktivitas dan Perubahan Aset Bersih dan Laporan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan akuntansi basis kas yang dimodifikasi seperti yang dijelaskan pada Catatan 2.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the Financial Statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the Financial Statements referred to above present fairly, in all material respects, the Financial Position of SMERU as of December 31, 2016 and the Statements of Activities and Changes in Net Assets and Cash Flows for the year then ended, in accordance with the modified cash basis of accounting as described in Note 2.



JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN

THE SMERU RESEARCH INSTITUTE (SMERU)

Basis Akuntansi dan Pembatasan Distribusi dan Penggunaan

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menarik perhatian ke Catatan 2 atas Laporan Keuangan, yang menjelaskan basis akuntansi. Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2, SMERU menyiapkan Laporan Keuangannya dengan menggunakan basis kas yang dimodifikasi, yang merupakan suatu basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai akibatnya, Laporan Keuangan tersebut mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Laporan kami ditujukan hanya untuk SMERU dan tidak diperkenankan untuk didistribusikan ke/atau digunakan oleh pihak-pihak selain SMERU.

Basis of Accounting and Restriction on Distribution and Use

Without modifying our opinion, we draw attention to Note 2 to the Financial Statements, which describes the basis of accounting. As described in Note 2, SMERU prepares its Financial Statements on the modified cash basis, which is a comprehensive basis of accounting other than generally accepted accounting principles in Indonesia. As a result, the Financial Statements may not be suitable for another purpose. Our report is intended solely for SMERU and should not be distributed to/or used by parties other than SMERU.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
NIU-KAP/Licence No. 951/KM.1/2010

Drs Johan Yoranouw
NRAP/Public Accountant Registration AP. 0732

23 April 2018/April 23, 2018

YAYASAN SMERU

Laporan Arus Kas per 31 Desember 2017 & 31 Desember 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2017 (Belum teraudit)	2016 (Telah diaudit)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Perubahan aset bersih	(7.345.114.362)	(1.292.723.508)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi kelebihan penerimaan atas pengeluaran pada kas bersih		
Penyusutan	628.310.182	105.254.510
Laba/rugi yang belum direalisasi atas Investasi	-	(76.423.232)
Penurunan (peningkatan) pada:		
Uang muka	300.500.000	96.973.400
Piutang	60.681.830	(131.060.564)
Biaya dibayar dimuka	7.433.091	(17.722.551)
Utang pajak	42.605.300	34.980.300
Biaya yang masih harus dibayar	(94.282.976)	17.495.625
Utang lain-lain	(85.328.244)	25.821.286
Kewajiban imbalan kerja	156.900.000	392.400.000
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(6.328.295.180)	- (845.004.735)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penjualan investasi	18.300.231.494	15.665.090.789
Penempatan pada investasi	(22.592.759.769)	(18.223.808.262)
Perolehan aset tetap	(1.140.335.677)	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(5.432.863.952)	(2.558.717.473)
Penurunan Bersih Kas	(11.761.159.132)	(3.403.722.208)
Kas dan setara kas, awal	21.252.273.533	24.655.995.741
Koreksi	1.552.495.196	-
Kas dan setara kas, akhir	11.043.609.597	21.252.273.533

YAYASAN SMERU

Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2017 & 31 Desember 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2017 (Belum teraudit)	2016 (Telah diaudit)
ASET		
Aset lancar		
Kas dan setara kas	11.043.609.597	21.252.273.533
Investasi jangka pendek	22.592.759.769	18.300.231.494
Uang muka	33.000.000	333.500.000
Piutang lain-lain	628.345.394	689.027.224
Biaya dibayar dimuka	232.648.139	240.081.230
Jumlah aset lancar	34.530.362.899	40.815.113.481
Aset tidak lancar		
Aset tetap - bersih	8.572.077.374	8.060.051.878
Jumlah aset tidak lancar	8.572.077.374	8.060.051.878
Jumlah aset	43.102.440.273	48.875.165.359
LIABILITAS DAN ASET BERSIH		
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pajak	139.406.100	96.800.800
Biaya yang masih harus dibayar	23.986.800	118.269.776
Utang lain-lain	2.162.460	87.490.704
Kewajiban imbalan kerja	2.667.320.000	2.510.420.000
Jumlah kewajiban	2.832.875.360	2.812.981.280
Aset bersih		
Tidak terikat	18.799.310.741	24.311.654.146
Terikat temporer	21.343.484.497	21.623.760.258
Terikat permanen	126.769.675	126.769.675
Jumlah aset bersih	40.269.564.913	46.062.184.079
Jumlah kewajiban dan aset bersih	43.102.440.273	48.875.165.359



DEWAN REDAKSI

Asep Suryahadi
Widjajanti Isdijoso
Hesti Marsono
Nuning Akhmadi
Syaikhu Usman
Nina Toyamah
Liza Hadiz

REDAKSI

Pengumpul Data

Ratri Indah Septiana
Felisita Lethe

Editor

Budhi Adrianto
Fandi Muhammad H
Wiwin Purbaningrum

Desainer Grafis

Novita Maizir

Desainer Infografis

Carolin Lim
Novita Maizir

Staf Distribusi

Heru Sutapa

Foto Sampul

Hafiz Arfyanto



smeru
RESEARCH INSTITUTE

 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;
+6221 3193 0850 (fax)

 smeru@smeru.or.id

 www.smeru.or.id

  @SMERUInstitute

  The SMERU Research Institute

